



PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS 1B



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019

Jl. Kolonel Kornel Singawinata No. 101 Purwakarta

 (0264) 8222014

 (0264) 200830

 www.pn-purwakarta.go.id

 info@pn-purwakarta.go.id

PENGANTAR

Dalam rangka memberikan informasi yang menyangkut kinerja dan pencapaian program kerja tahunan yang harus disampaikan kepada pimpinan secara berjenjang di atasnya dalam bentuk laporan, maka disusunlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B untuk Tahun Anggaran 2019.

Untuk mengenal lebih dekat tumbuh kembangnya peradilan umum khususnya Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B dengan visi dan misinya serta saran dan kritik orang lain tentang kinerja dan pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat pencari keadilan maka dengan rahmat Allah SWT Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B telah dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019.

Laporan ini kami susun untuk memenuhi pertanggung jawaban mengenai program kegiatan dan pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B Tahun Anggaran 2019.

Demikianlah laporan ini disusun semoga dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi selanjutnya.

Purwakarta, 9 Januari 2020

Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B



Rustanto, S.H., M.H.

NIP. 196707101991031006

DAFTAR ISI

Pengantar	1
Daftar Isi	2
Bab I Pendahuluan	4
Bab II A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Purwakarta.....	9
- Keadaan Perkara di Tingkat Pertama	9
- Keadaan Perkara di Tingkat Banding.....	9
- Keadaan Perkara di Tingkat Kasasi	9
- Keadaan Perkara di Tingkat Peninjauan Kembali	10
B. Penyelesaian Perkara	10
- Jumlah sisa perkara yang diputus	10
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	10
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	11
- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi	11
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi	12
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	12
- Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran) .	13
- Sidang keliling/pelayanan terpadu.....	14
- Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara)	14
Bab III Sumber Daya Manusia	15
Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan kepangkatan/ golongan/ pendidikan	15
- Mutasi	17
- Promosi.....	18
- Pensiun.....	18
- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)	18
Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi	20
A. Pengelolaan Keuangan	20
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	21
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	26
- Implementasi e-Court di Pengadilan Negeri Purwakarta	26
- Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Purwakarta	27
Bab V Peningkatan Pelayanan Publik	29
- Akreditasi Penjaminan Mutu.....	29
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	29

	- Inovasi Pelayanan Publik	31
Bab VI	Pengawasan	33
	A. Internal	33
	B. Evaluasi	35
Bab VII	Penutup.....	36
	A. Kesimpulan	36
	B. Rekomendasi	37

BAB I PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Salah satu fungsi peradilan dalam melaksanakan system peradilan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi secara umum yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, adanya kebijakan umum peradilan yang harus dijalankan oleh seluruh lembaga peradilan Indonesia dibawah Mahkamah Agung.

Bahwa yang dimaksud dengan kebijakan umum peradilan adalah Peraturan-Peraturan yang dapat memberikan pengaruh dalam melaksanakan system peradilan secara umum. Peraturan-Peraturan dimaksud dapat berbentuk suatu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau bentuk-bentuk peraturan lain yang terkait dengan organisasi peradilan.

Dalam prakteknya kebijakan umum peradilan pasti akan selalu berubah, yang perubahannya akan mempengaruhi operasionalnya suatu organisasi peradilan, misalnya kebijakan tentang petunjuk teknis menyangkut prosedur pembayaran biaya perkara di Pengadilan Negeri.

Menyangkut kebijakan umum peradilan ini ada 2 (dua) kategori yang harus dibedakan, yaitu:

1. Kebijakan yang bersifat Teknis Yuridis.
2. Kebijakan yang bersifat Teknis Administrasi.

Kebijakan yang bersifat Teknis Yuridis, diantaranya yaitu:

- Mempercepat proses penyelesaian perkara.
- Menekan biaya perkara tidak terlalu tinggi.
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
- Menjaga kemandirian Badan Peradilan

Kebijakan yang bersifat Teknis Administrasi, diantaranya yaitu:

- Pengelolaan Administrasi/Manajemen peradilan yang baik.
- Pengelolaan manajemen sarana dan prasarana peradilan.
- Peningkatan sumber daya manusia (SDM).
- Pengelolaan Teknologi Informasi yang diperlukan organisasi peradilan.

Atas dasar kebijakan tersebut suatu kebijakan umum peradilan haruslah dilaksanakan secara efektif di lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung untuk mencapai Visi dan Misi Mahkamah Agung untuk “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”.

B. Visi dan Misi

1. Visi (Terwujudnya Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B Yang Agung).

Terwujudnya citra dan wibawa serta kemandirian Peradilan Umum dalam pelaksanaan tugas pokok dan kewenangannya yang bermartabat dan dihormati demi tegaknya hukum, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum di tengah masyarakat Purwakarta.

2. Misi

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B.

3. Motto

Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B " ISTIMEWA ".

Inovatif, Sinergis, Terpadu, Integritas, Mandiri, Efisien, Wibawa, Akuntabel.

4. Kebijakan Mutu:

1. Memberikan Pelayanan Yang Berkualitas Bagi Pencari Keadilan Dan Masyarakat Dengan Tulus Dan Ikhlas.
2. Memberikan Kepuasan Bagi Masyarakat Pencari keadilan Dengan melakukan Peningkatan Pelayanan Tepat Waktu.
3. Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengadilan.
4. Melakukan Evaluasi Secara Berkala Dan Berkesinambungan Terhadap Sistem Manajemen Mutu Dan Pelaksanaanya.

C. Rencana Strategis (Renstra)

Dengan kondisi lingkungan peradilan saat ini sebagai penegak supremasi hukum yang mendapat sorotan dari berbagai pihak dan dengan beralihnya pandangan terhadap para pelaku birokrasi pelayanan masyarakat, maka tujuan yang hendak dicapai dilingkungan Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B, yaitu meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Di dalam penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B

masih ada permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- Permasalahan yang menyangkut perkara yaitu:
 1. Kurangnya ruangan untuk ruangan khusus bagi masyarakat pencari keadilan yang akan mengadakan persoalan yang berkaitan dengan putusan maupun proses perkara yang ada di Pengadilan Negeri Purwakarta sebagaimana diisyaratkan dalam Surat Keputusan KMA Nomor 076/KMA/SK/VI/2009.
 2. Kurangnya tenaga staf yang berstatus PNS dimasing-masing kepaniteraan yang mana dirasakan juga menghambat untuk proses penanganan perkara.
- Permasalahan yang menyangkut sarana dan prasarana kantor yaitu:
 1. Ruangan sidang yang sempit dan kurang memadai, juga belum seluruhnya terpasang audio/pengeras suara.
 2. Luas Tanah dan Gedung Bangunan Kantor Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B belum memenuhi standar Prototype Kelas 1B.
 3. Belum tersedianya tempat penyimpanan barang bukti dan gudang logistik yang baik.
 4. Ruangan Tahanan masih sempit.
 5. Tempat Parkir kendaraan yang tidak memadai.
 6. Belum adanya ruang untuk Ibu Menyusui.
 7. Belum adanya ruang diversi.
 8. Belum adanya ruang server.
 9. Ruang Arsip sudah tidak memadai/sudah penuh.
 10. Belum semua ruangan/tempat terpantau CCTV.

Untuk upaya memberikan pelayanan prima dalam pelaksanaan tugas pokok dari lembaga peradilan umum untuk menegakan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum kepada masyarakat pencari keadilan, maka diperlukan kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan efisiensi dan pengawasan.
2. Peningkatan kesadaran hukum dan pelayanan hukum.
3. Peningkatan sumber daya manusia.
4. Peningkatan sarana dan prasarana.
5. Peningkatan sarana informatika.

Adapun bentuk kongkret dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B adalah sebagaimana tersebut di bawah ini:

- Menyelenggarakan Urusan Kepegawaian secara tepat dan akurat dengan Peningkatan SDM, Pelaksanaan tugas pelayanan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai dengan kegiatan:
 - Mengusulkan penambahan pegawai untuk Gol.II.
 - Mengirimkan PNS untuk mengikuti Diklat struktural dan/atau fungsional.

- Mengadakan rapat dinas untuk melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural/fungsional dan pegawai secara berkala.
- Membuat DUK pegawai.
- Membuat DP3 pegawai.
- Mengusulkan kenaikan pangkat pegawai.
- Menerbitkan SK kenaikan gaji berkala pegawai
- Menerbitkan surat pernyataan (SPMT & SPMJ) pejabat struktural/fungsional.
- Menerbitkan dan mengusulkan izin cuti pegawai.
- Melakukan penertiban dan pemeliharaan file pegawai..
- Mengolah, membuat dan mengirimkan laporan tahunan kepegawaian.
- Membuat Surat-surat Keputusan Ketua.
- Membuat Daftar KP.4.
- Membuat daftar hadir dan absensi Pegawai
- Membuat usulan nominatif
- Membuat SKP (Sasaran Kerja Pegawai)
- Memasukan data kepegawaian kedalam aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI
- Menyelenggarakan urusan umum dengan meningkatkan penyelenggaraan tata persuratan, perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan secara baik dan benar dengan kegiatan:
 - Penyelenggaraan Arsip dinamis. sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik.
 - Mengelola tata persuratan, baik surat masuk atau keluar, hal ini sudah dilaksanakan dan berjalan sebagaimana mestinya.
 - Mengadakan perlengkapan kantor, dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
 - Mengadakan dan menata usahakan keperluan rumah tangga kantor, dilaksanakan dan berjalan sebagaimana mestinya.
 - Mencatat inventaris barang milik kekayaan Negara dalam buku induk DIR, KIB dan DIL, dilaksanakan sesuai dengan aplikasi data SIMAK-BMN yang ada.
 - Melakukan Rekon internal BMN setiap bulannya.
 - Mengusulkan Surat Izin Keputusan Penghunian Rumah Dinas.untuk Hakim.
 - Memelihara gedung kantor dan infra struktur, yang dilaksanakan secara rutinitas sesuai dengan anggaran biaya yang tersedia.
 - Memelihara kendaraan bermotor, yang diserahkan perawatannya kepada masing-masing pemegang kendaraan bermotor dengan anggaran yang tersedia.
 - Melaksanakan laporan perlengkapan secara berkala.tiap satu semester.
 - Memelihara perlengkapan kantor lainnya, secara rutin dilaksanakan oleh petugas bagian umum terhadap beberapa perlengkapan kantor lainnya.

- Menyelenggarakan Anggaran yang efektif dengan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan secara tertib dengan kegiatan:
 - Membuat dan menyusun RKA-KL.
 - Penata usahaan pembukuan.
 - Penyusunan laporan yang akurat.
 - Pertanggung jawaban keuangan.
- Peningkatan efisiensi kerja dan pengawasan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat struktural dan fungsional maupun pegawai dengan kegiatan:
 - Pengawasan secara berjenjang/pengawasan melekat dilaksanakan oleh Atasan langsung masing-masing.
 - Pelaksanaan Rapat rutin setiap bulan maupun Rapat sewaktu-waktu yang sifatnya penting.
 - Pelaksanaan Rapat rutin perbagian setiap bulanya yang dilaksanakan bersama Hakim Pengawas Bidang
- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam penyelesaian perkara.

BAB II

A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Purwakarta

- Keadaan Perkara di Tingkat Pertama

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara 2018	Perkara Masuk 2019	Perkara Yang Diputus 2019	Sisa Perkara 2019	Ket.
I	Perkara Pidana					
1	Pidana Biasa	36	303	285	54	
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	
3	Pidana Anak	-	2	2	-	
4	Pidana Ringan	-	36	36	-	
5	Pidana Lalu Lintas	-	43.678	43.678	-	
6	Praperadilan	-	-	-	-	
II	Perkara Perdata					
7	Perdata Gugatan	19	39	40	18	
8	Perdata Gugatan Sederhana	-	1	1	-	
9	Perdata Permohonan	7	275	276	6	
Jumlah		62	44.334	44.318	78	

- Keadaan Perkara di Tingkat Banding

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Banding 2018	Masuk Permohonan Banding 2019	Putusan Pengadilan Tingkat Banding	Sisa Perkara Banding 2019	Ket.
I	Perkara Pidana					
1	Pidana Biasa	4	12	13	2	1 Dicabut
2	Pidana Anak	-	-	-	-	
II	Perkara Perdata					
3	Perdata Gugatan	-	7	7	-	
Jumlah			19	18	-	

- Keadaan Perkara di Tingkat Kasasi

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Kasasi 2018	Masuk Permohonan Kasasi 2019	Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi	Sisa Perkara Kasasi 2019	Ket.
I	Perkara Pidana					
1	Pidana Biasa	10	15	17	8	
2	Pidana Anak	-	-	-	-	
II	Perkara Perdata					

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Kasasi 2018	Masuk Permohonan Kasasi 2019	Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi	Sisa Perkara Kasasi 2019	Ket.
3	Perdata Gugatan	2	6	-	8	
Jumlah		2	14	3	13	

- Keadaan Perkara di Tingkat Peninjauan Kembali

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara PK 2018	Masuk Permohonan PK 2019	Putusan Tingkat PK	Sisa Perkara PK 2019	Ket.
I	Perkara Pidana					
1	Pidana Biasa	-	-	-	-	
2	Pidana Anak	-	-	-	-	
II	Perkara Perdata					
3	Perdata Gugatan	1	1	2	-	
Jumlah		1	1	2	-	

B. Penyelesaian Perkara

- Jumlah sisa perkara yang diputus

Jumlah sisa perkara yang diputus selama bulan Januari 2019 s/d Desember 2019 pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B sebagai berikut.

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara 2018	Perkara Masuk 2019	Perkara Yang Diputus 2019	Sisa Perkara 2019	Ket.
I	Perkara Pidana					
1	Pidana Biasa	36	303	285	54	
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	
3	Pidana Anak	-	2	2	-	
4	Pidana Ringan	-	36	36	-	
5	Pidana Lalu Lintas	-	43.678	43.678	-	
6	Pra Peradilan	-	-	-	-	
II	Perkara Perdata					
7	Perdata Gugatan	19	39	40	18	
8	Perdata Gugatan Sederhana	-	1	1	-	
9	Perdata Permohonan	7	275	276	6	
Jumlah		62	44.334	44.318	78	

- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

Jumlah perkara yang diputus tepat waktu selama bulan Januari 2019 s/d

Desember 2019 pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B sebagai berikut.

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara 2018	Perkara Masuk 2019	Putus tepat waktu (< 5 bulan)
I	Perkara Pidana			
1	Pidana Biasa	36	303	285
2	Pidana Singkat	-	-	-
3	Pidana Anak	-	2	2
4	Pidana Ringan	-	36	36
5	Pidana Lalu Lintas	-	43.678	43.678
6	Pra Peradilan	-	-	-
II	Perkara Perdata			
7	Perdata Gugatan	19	39	35
8	Perdata Gugatan Sederhana	-	1	1
9	Perdata Permohonan	7	275	276
Jumlah		62	44.334	44.313

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK
Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK selama bulan Januari 2019 s/d Desember 2019 pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B sebagai berikut.

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara 2018	Perkara Masuk 2019	Perkara Yang Diputus 2019	Sisa Perkara 2019	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, PK)
I	Perkara Pidana					
1	Pidana Biasa	36	303	285	54	264
2	Pidana Anak	-	2	2	-	2
II	Perkara Perdata					
3	Perkara Gugatan	19	39	40	18	33
4	Perkara Gugatan Sederhana	-	1	1	-	-
Jumlah		55	345	328	72	299

- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi
Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi selama bulan Januari 2019 s/d Desember 2019 pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B sebagai berikut.

No	Jenis Perkara	Perkara Masuk 2019	Mediasi				
			Akta Damai	Berhasil Dengan Pencabutan	Berhasil Sebagian	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
1	Perkara Gugatan	39	2	2	-	29	-
2	Perkara Gugatan Sederhana	1	-	-	-	-	-
Jumlah		40	2	2	-	29	-

- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi
Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi selama bulan Januari 2019 s/d Desember 2019 pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B sebagai berikut.

No	Jenis Perkara	Perkara Masuk 2019	Diversi	
			Berhasil	Tidak Berhasil
1	Perkara Anak	2	2	-
Jumlah		2	2	-

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

- Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B telah berhasil memperoleh Sertifikasi APM (Akreditasi Penjaminan Mutu) dengan predikat A Excellent dari Dirjen Badan Peradilan Umum pada tanggal 24 Juli 2018 dengan Nomor TAPM.029/QMR/SERTIFIKAT/7/2018, yang bukan saja sangat membanggakan, namun juga menjadi cambuk agar Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B dapat mempertahankan penghargaan dengan terus meningkatkan layanan publik dan kinerjanya di masa yang akan datang.
- Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B telah dilakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada hari Kamis tanggal 20 bulan Juli tahun 2017 yang telah di Asesor oleh Tim Reformasi dari Mahkamah Agung RI dengan Capaian 82,38 (delapan puluh dua koma tiga puluh delapan) dengan nilai yang sangat baik, sebagai ketua Tim Asesor Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
- Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B telah dilakukan penilaian kembali pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada hari Kamis tanggal 5 bulan Juli tahun 2018 yang telah di Asesor oleh Tim Reformasi dari Mahkamah Agung RI dengan Capaian 83,64 (delapan puluh tiga koma enam puluh empat) dengan nilai yang sangat baik, sebagai ketua Tim Asesor Drs. Erwin Widanarko, S.H., SAP., M.Pd.

- Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B telah dilakukan Surveilans Audit Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) pada hari Kamis tanggal 3 bulan Oktober tahun 2019 oleh Tim Surveilans Audit Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Bandung sebagai ketua Tim Surveilans, Eddy Pangaribuan, S.H., M.H. dengan skor 715 (tujuh ratus lima belas) dengan nilai yang sangat baik A “Excellent”.
- Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran)
 - Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
 - Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B telah melaksanakan kegiatan Posbakum dalam kegiatan tahun 2019 dan Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B mendapatkan Pos Bantuan Hukum sebesar Rp 62.400.000,- (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
 - Pada setiap Pengadilan dibentuk Posbakum Pengadilan. Pembentukan Posbakum Pengadilan dilakukan secara bertahap. Pengadilan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Pengadilan harus menyediakan akses bagi terdakwa yang sedang ditempatkan pada ruang tahanan Pengadilan untuk bisa mengakses layanan Posbakum Pengadilan.
 - Posbakum Pengadilan Negeri Purwakarta memberikan layanan berupa:
 - a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
 - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
 - c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

- Sidang keliling/pelayanan terpadu
Pada saat ini Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B belum melaksanakan kegiatan sidang keliling dikarenakan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B belum memadai.

- Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara)
Pada tahun 2019 di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B terdapat 2 perkara prodeo.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan

- Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta berdasarkan kepangkatan, golongan dan pendidikan adalah sebagai berikut.

No	Nama	Jabatan	Pangkat	Gol. Ruang	Pendidikan	Ket.
1	Rustanto, S.H., M.H.	Ketua	Pembina Tk.I	IV/b	S2	
2	Jarot Widiyatmono, S.H.	Wakil Ketua	Pembina Tk.I	IV/b	S1	
3	Dr. Devi Mahendrayani H., S.H., M.H.	Hakim	Pembina	IV/a	S3	
4	Novita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.	Hakim	Pembina	IV/a	S2	
5	Dewi Apriyanti, S.H., M.H.	Hakim	Pembina	IV/a	S2	
6	Hj. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.	Hakim	Pembina	IV/a	S2	
7	Dian Sari Oktarina, S.H.	Hakim	Pembina (IV/a)	IV/a	S2	
8	Nurhuda, S.H., M.H.	Hakim	Penata Tk. I	III/d	S2	
9	Hendhy Eka Chandra, S.H.	Hakim	Penata Tk. I	III/d	S1	
10	Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.	Hakim	Penata Tk. I	III/d	S2	
11	Otto Edwin, S.H., M.H.	Hakim	Penata Tk. I	III/d	S2	
12	Syarifuddin, S.H., M.Hum.	Panitera	Pembina	IV/a	S2	
13	Gegen Diosya Surendageni, S.H., M.H.	Sekretaris	Penata Tk. I	III/d	S2	
14	Suyat, S.H.	Panitera Muda Perdata	Penata Tk. I	III/d	S1	
15	Hendro Catur Sucahyo, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Penata Tk. I	III/d	S2	
16	Iis Cahya Suningsih	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Penata	III/c	SLTA	
17	Sasa Ismail	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Penata	III/c	SLTA	
18	Erfin Fitriadi, S.Kom.	Kepala Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Penata Muda Tk.I	III/b	S1	

No	Nama	Jabatan	Pangkat	Gol. Ruang	Pendidikan	Ket.
19	Nurmaniah, S.H.	Panitera Pengganti	Penata Tk. I	III/d	S1	
20	Rosidin	Panitera Pengganti	Penata	III/c	SLTA	
21	Suherlan	Panitera Pengganti	Penata	III/c	SLTA	
22	Ade Suparman	Panitera Pengganti	Penata	III/c	SLTA	
23	Rusmaida Sitompul	Panitera Pengganti	Penata	III/c	SLTA	
24	Abdul Kholik	Panitera Pengganti	Penata	III/c	SLTA	
25	Iwan Gunawan, S.H.	Panitera Pengganti	Penata	III/c	S1	
26	Iwan Ruswandi, S.H.	Panitera Pengganti	Penata Tk. I	III/d	S1	
27	Bogan, S.H.	Panitera Pengganti	Penata Tk. I	III/d	S1	
28	Melly Sinaga, S.H.	Panitera Pengganti	Penata	III/c	S1	
29	Mellisa Harahap, S.H., M.Kn.	Panitera Pengganti	Penata	III/c	S2	
30	Ginanda Fatwasari, S.H.	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk.I	III/b	S1	
31	Nandang Saprudin	Juru Sita	Penata Muda Tk.I	III/b	SLTA	
32	Pahrudin	Juru Sita	Penata Muda Tk.I (III/b)	III/b	SLTA	
33	Arif Hermawan, A.Md.	Juru Sita	Penata Muda Tk.I (III/b)	III/b	D3	
34	Kurnawan	Juru Sita Pengganti	Penata Muda Tk.I	III/b	SLTA	
35	Agus Indratno	Juru Sita Pengganti	Pengatur Tk.I	II/d	SLTA	
36	Keristian Danur, AMd.	Juru Sita Pengganti	Penata Muda	III/a	D3	
37	Ade Totong Subarna	Staf	Pengatur Muda Tk.I	II/b	SLTA	
38	Tina Suhartini, S.Sy.	Staf	Penata Muda	III/a	S1	CPNS
39	Niluh Sagitha Vinesha Putri, S.Psi.	Staf	Penata Muda	III/a	S1	CPNS
40	Neng Dede Amalia, A.Md.	Staf	Pengatur	II/c	D3	CPNS
41	Nanang Ginanjar	Honorar	-		SLTA	
42	R. A. Muhamad Ramdan	Honorar	-		SLTA	
43	Khairul Khalil	Honorar	-		SLTA	
44	Andi Maulana	Honorar	-		S1	
45	Brilliandy	Honorar	-		D3	
46	Ujang Hendi Rohendi	Honorar	-		SLTA	
47	Diki	Honorar	-		SLTA	
48	Robi Sugara	Honorar	-		SLTA	

No	Nama	Jabatan	Pangkat	Gol. Ruang	Pendidikan	Ket.
49	Reni Tri Mulyani	Honoror	-		S1	
50	Intan Parhanawati	Honoror	-		D3	
51	Arum Nisa Febriyani	Honoror	-		S1	

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Jumlah sumber daya manusia yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Teknis Yudisial pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Purwakarta sampai dengan 31 Desember 2019 didukung oleh 32 orang yang terdiri dari:

- a. 11 orang Hakim
- b. 1 orang Panitera
- c. 2 orang Panitera Muda
- d. 12 orang Panitera Pengganti
- e. 3 orang Juru Sita
- f. 3 orang Juru Sita Pengganti

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Jumlah Sumber Daya Manusia yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Non Teknis Yudisial pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Purwakarta sampai dengan 31 Desember 2019 didukung oleh 15 orang yang terdiri dari:

- a. 1 orang Sekretaris
- b. 3 orang Kepala Sub Bagian
- c. 4 orang Pelaksana/Staf
- b. 7 orang Honoror/Tenaga Kontrak

- Mutasi

Mutasi pada Pengadilan Negeri Purwakarta terdiri dari mutasi masuk dan mutasi keluar. Pada Tahun 2019 terdapat 4 pegawai yang masuk ke Pengadilan Negeri Purwakarta dan sebanyak 2 pegawai yang mutasi ke luar Pengadilan Negeri Purwakarta, sehingga jumlah pegawai yang mutasi pada tahun 2019 sebanyak 6 pegawai dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama	Jabatan/Unit Kerja	
		Lama	Baru
I	Mutasi Masuk		
1	Rustanto, S.H., M.H.	Wakil Ketua PN Sumber	Ketua PN Purwakarta
2	Jarot Widiyatmono, S.H.	Ketua PN Kayu Agung	Wakil Ketua PN Purwakarta

No	Nama	Jabatan/Unit Kerja	
		Lama	Baru
I	Mutasi Masuk		
3	Syarifuddin, S.H., M.Hum.	Panitera PN Magetan	Panitera PN Purwakarta
4	Otto Edwin, S.H., M.H.	Hakim PN Lumajang	Hakim PN Purwakarta
II	Mutasi Keluar		
5	M. Noor Chambali, S.H.	Panitera PN Purwakarta	Panitera PN Boyolali
6	Aini Yaturrohmah, S.H.	Panitera Pengganti PN Purwakarta	Panitera Pengganti PN Jakarta Timur

- Promosi

Pada tahun 2019 terdapat 4 pegawai Pengadilan Negeri Purwakarta yang promosi, antara lain:

No	Nama	Jabatan/Unit Kerja	
		Lama	Baru
1	Lindowaty Simanihuruk, S.H., M.H.	Ketua PN Purwakarta	Hakim PN Jakarta Barat
2	Effendi, S.H.	Wakil Ketua PN Purwakarta	Ketua PN Stabat
3	Himelda Sidabalok, S.H., M.H.	Hakim PN Purwakarta	Wakil Ketua PN Tanjungpandan
4	Dwi Parawirawan, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana PN Purwakarta	Panitera Muda Perdata PN Tasikmalaya

- Pensiun

Pada tahun 2019 terdapat 1 pegawai Pengadilan Negeri Purwakarta yang pensiun, antara lain:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Rita Riana, Sm.Hk.	Panitera Pengganti	Pensiun TMT 1 Maret 2018

- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

No	Kegiatan Diklat	Nama Peserta dan Jabatan
I	Teknis	
1	Pelatihan Tematik Tindak Pidana Pemilu	Himelda Sidabalok, S.H., M.H. Hakim
2	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu SPPA	Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H. Hakim
3	Training of Mentor III Gelombang I Program PPC Terpadu	1. Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H. Hakim 2. Hendhy Eka Chandra, S.H. Hakim 3. Nofita Dwi Wahyuni, .SH.MH

No	Kegiatan Diklat	Nama Peserta dan Jabatan
		Hakim
4	Sosialisasi e-Court	1. Rustanto, S.H., M.H. Ketua 2. Hendhy Eka Chandra, S.H. Hakim 3. Ginanda Fatwasari, S.H. Panitera Pengganti 4. Brillandy Honorar
5	Evaluasi Penyelenggara PPC Terpadu	1. Rustanto, S.H., M.H. Ketua 2. Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H. Hakim 3. Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H. Hakim 4. Hendhy Eka Chandra, S.H. Hakim
6	Mentor Aktualisasi Peserta Latsar CPNS Gol III	Hendhy Eka Chandra, S.H. Hakim
7	Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.	Sosialisasi Implementasi SPPT-TI
8	Mentor Aktualisasi Peserta Latsar CPNS Gol III	Rustanto, S.H., M.H. Ketua
9	Bimbingan Teknis Informasi Penelusuran Perkara SIPP 3.3.0 Tahun Anggaran 2019	1. Rustanto, S.H., M.H. Ketua 2. Syarifuddin, S.H., M.Hum. Panitera 3. Brillandy Honorar
10	Bimbingan Teknis dan Diseminasi Informasi Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata Lintas Negara	M. Noor Chambali, S.H.
II	Non Teknis	
11	Undangan Acara Penyempurnaan RKA-KL Anggaran Tahun 2020	1. Gegen Diosya Surendageni, S.H, M.H. Sekretaris 2. Erfin Fitriadi, S.Kom. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 3. Sasa Ismail Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN
TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

- Realisasi Anggaran DIPA

1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

a) Belanja Pegawai

- Pagu	Rp5.372.912.000,-
- Realisasi	Rp5.307.193.756,-
- Sisa	Rp 65.718.244,-

b) Belanja Barang Operasional

- Pagu	Rp 861.021.000,-
- Realisasi	Rp 854.623.088,-
- Sisa	Rp 6.397.912,-

c) Belanja Barang Non Operasional

- Pagu	Rp 4.800.000,-
- Realisasi	Rp 4.790.000,-
- Sisa	Rp 10.000,-

d) Belanja Modal

- Pagu	Rp 102.500.000,-
- Realisasi	Rp 102.400.000,-
- Sisa	Rp 100.000,-

PAGU DAN REALISASI BELANJA								
No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja			Total
					Pegawai	Barang	Modal	
1	005-097603	PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA	021	PAGU	5,372,912,000	865,821,000	102,500,000	6,341,233,000
				REALISASI	5,307,193,756	816,337,077	102,400,000	6,269,006,844
				PERSENTASE	(98,78%)	(99,25%)	(99,90%)	(98,86%)
				SISA	65,718,244	6,407,912	100,000	72,126,156
TOTAL				PAGU	5,372,912,000	865,821,000	102,500,000	6,341,233,000
				REALISASI	5,307,193,756	859,413,088	102,400,000	6,269,006,844
				PERSENTASE	(98,78%)	(99,25%)	(99,90%)	(98,86%)
				SISA	65,718,244	6,407,912	100,000	72,126,156

2. DIPA 03 (Dirjen Badilum)

- Pagu	Rp 272.110.000,-
- Realisasi	Rp 263.207.900,-
- Sisa.....	Rp 8.902.100,-
- Persentase	96,72%

PAGU DAN REALISASI BELANJA 03								
No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja			Total
					Pegawai	Barang	Modal	
1	005-097603	PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA	021	PAGU	0	272,110,000	0	272,110,000
				REALISASI		263,207,900		263,207,900
				PERSENTASE	0,00%	(96,72%)	0,00%	(96,72%)
				SISA	0	8,902,100	100,000	8,902,100
TOTAL				PAGU	0	272,110,000	0	272,110,000
				REALISASI		263,207,900		263,207,900
				PERSENTASE	0,00%	(96,72%)	0,00%	(96,72%)
				SISA	0	8,902,100	0	8,902,100

- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 1. PNBP DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)
 - Estimasi Pendapatan Rp16.000.000,-
 - Realisasi (Januari s/d Desember 2019) Rp31.771.432,-
atau 198,57% dari Estimasi Pendapatan.
 2. PNBP DIPA 03 (Dirjen Badilum)
 - Estimasi Pendapatan Rp30.250.000,-
 - Realisasi (Januari s/d Desember 2019) Rp44.789.900,-
atau 148,06% dari Estimasi Pendapatan.

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut.

- Sarana telepon dengan nomor (0264) 8222014 dan faximile dengan nomor (0264) 200830.
- Website Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B dengan alamat <http://www.pn-purwakarta.go.id> sebagai fasilitas dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik. Pencari informasi yang ingin mendapatkan informasi tentang Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B tanpa harus langsung mendatangi kantor dapat mengakses website resmi tersebut.
- 1 buah komputer informasi di bagian meja informasi yang berfungsi sebagai informasi mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
- 1 buah monitor TV LED 52 inch yang berfungsi sebagai info media center dengan menampilkan agenda persidangan dan statistik perkara.
- 1 mesin kiosk Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Indeks Persepsi Korupsi yang berada di lobi Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B.
- Meja pojok e-Court yang berfungsi sebagai sarana pelayanan khusus mengenai e-Court.
- Meja Inzage.
- 1 buah mesin antrian PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang berfungsi untuk mencetak nomor antrian PTSP. Mesin Antrian PTSP sudah terpasang sejak hari Senin tanggal 19 November 2018 dan telah terkoneksi ke masing-masing meja PTSP. Mesin antrian PTSP juga terintegrasi dengan aplikasi Survei Indeks Kepuasan Masyarakat sehingga survei bisa dilakukan secara

elektronik. Selain antrian PTSP dan Survei Kepuasan masyarakat kritik dan saran pun bisa dilakukan melalui media elektronik yang telah disediakan bagi pengguna/pengunjung pada Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B.

- 2 ruang sidang dewasa terdiri dari:
 - Ruang Sidang Cakra
 - Ruang Sidang Garuda
 - 1 ruang sidang anak.
 - 1 ruang tunggu ramah anak.
 - 1 ruang mediasi.
 - 1 ruang tahanan pria.
 - 1 ruang tahanan wanita.
 - 1 ruang tahanan anak.
 - 1 ruang perpustakaan.
 - 1 ruang pos bakum.
 - 1 ruang arsip pidana dan perdata.
 - 1 ruang tunggu jaksa.
 - 1 ruang teleconference.
 - 1 ruang tunggu pengunjung.
 - 1 ruang kerja Ketua.
 - 1 ruang kerja Wakil Ketua.
 - 2 ruang kerja Hakim.
 - 1 ruang kerja Panitera.
 - 1 ruang kerja Sekretaris.
 - 1 ruang kerja Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
 - 1 ruang kerja Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
 - 1 ruang kerja Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - 1 ruang kerja Panitera Pengganti.
 - 1 ruang kerja Kepaniteraan Pidana.
 - 1 ruang kerja Kepaniteraan Perdata.
 - 1 ruang kerja Kepaniteraan Hukum.
-
- Daftar Sarana Fasilitas Kantor
 - 1. AC Split : 49 Unit
 - 2. Komputer : 37 Unit
 - 3. Laptop : 21 Unit
 - 4. Sound system : 4 Unit

5. Printer	:	38 Unit
6. Bangku panjang kayu	:	20 Unit
7. Infocus	:	1 Unit
8. Scanner	:	4 Unit
9. PABX	:	1 Unit
10. Camera Digital	:	1 Unit
11. Mesin Absen	:	2 Unit
12. Tabung Pemadam Api	:	9 Unit
13. Mesin Fax	:	3 Unit
14. Mesin Ketik	:	3 Unit
15. Lemari Besi	:	8 Unit
16. Filling Kabinet	:	8 Unit
17. Meja Kerja Kayu	:	61 Unit
18. Kursi Besi Metal	:	77 Unit
19. Televisi	:	8 Unit
20. Router	:	1 Unit
21. Server	:	2 Unit
22. Jaringan LAN	:	- Paket
23. Pompa air	:	1 Unit
24. Genset	:	1 Unit
25. Microfon Tabel	:	1 Unit
26. CCTV	:	2 Unit
27. Mesin Antrian	:	1 Unit
28. Faximile	:	3 Unit
29. UPS	:	27 Unit
30. Dispenser	:	3 Unit
31. Kipas Angin	:	8 Unit
32. Bangku Panjang Besi	:	32 Buah
33. Meja Komputer	:	5 Buah
34. Wireless	:	Buah
35. Lemari Kayu	:	12 Unit
36. Rak Besi	:	24 Buah
37. Rak Kayu	:	1 Buah
38. Brankas	:	2 Buah
39. Papan Visual	:	12 Unit
40. Whiteboard	:	3 Buah

41. Alat Detektor : 3 Buah
 42. Kursi Kayu : 47 Buah
 43. Sice : 10 Unit

- Kendaraan Dinas Roda 4

No	Jenis Kendaraan	Tahun perolehan	Kondisi	Keterangan
1	Fortuner	2019	Baik	Mobil Dinas Ketua
2	Grand Vitara	2007	Rusak ringan	Mobil Dinas Wakil Ketua
3	Kijang Inova	2009	Baik	Mobil Dinas Panitera
4	Kijang Kapsul	2004	Rusak	Mobil Dinas Sekretaris

- Kendaraan Dinas Roda 2

No	Jenis Kendaraan	Tahun perolehan	Kondisi	Keterangan
1	Honda GLP	2006	Rusak	
2	Honda GLP	2006	Rusak	
3	Honda GLP	2008	Rusak	
4	Honda GLP	2009	Baik	
5	Supra X 125	2009	Baik	
6	Supra X 125	2011	Baik	
7	Karisma	2003	Rusak ringan	
8	Vario	2011	Baik	

- Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Rumah Dinas Ketua	1	Baik	Diisi oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B
2	Rumah Dinas Panitera	1	Rusak ringan	Diisi oleh Panitera
3	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	Rusak ringan	Diisi oleh Wakil Ketua
4	Rumah Dinas Hakim	6	Rusak ringan	Diisi oleh para Hakim

2. Pemeliharaan

Dalam Tahun Anggaran 2019 terdapat pemeliharaan/perbaikan Gedung Kantor dan Rumah Dinas yang dilaksanakan sesuai dengan tingkat kerusakan dan disesuaikan dengan Anggaran yang tersedia, pemeliharaan tersebut antara lain:

- Pemeliharaan Gedung Kantor yang meliputi perbaikan taman, perbaikan tembok, skat ke tahanan, penggantian plafon/internit, pengecatan seluruh gedung dengan dana senilai Rp65.700.000,- (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Adapun luas tanah yang dimiliki terdiri dari:

- a. Tanah Bangunan Kantor seluas 1.645 m² dengan Sertifikat Hak Pakai No. 21 terletak di Jl. K.K. Singawinata atas nama Pemerintah R.I. Cq. Mahkamah Agung R.I., aset senilai Rp14.048.300.000,- (empat belas milyar empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- b. Tanah Bangunan Rumah Dinas Golongan I seluas 500 m² aset senilai Rp1.940.325.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah.)
- c. Tanah Bangunan Rumah Dinas Golongan II seluas 3.075 m² aset senilai Rp. 7.546.657.000,- (tujuh milyar lima ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah); dengan Rincian sebagai berikut:
 1. Sertifikat Hak Pakai No. 10 seluas 765 m² tanah terletak di Kelurahan Nagrikaler atas nama Pemerintah R.I. Cq. Mahkamah Agung R.I.;
 2. Sertifikat Hak Pakai No. 11 seluas 200 m² terletak di Kelurahan Nagrikaler, atas nama Pemerintah R.I. Cq. Mahkamah Agung R.I.;
 3. Sertifikat Hak Pakai No. 1 seluas 500 m² terletak di Kelurahan Cipaisan, atas nama Pemerintah R.I. Cq. Mahkamah Agung R.I.
 4. Sertifikat Hak Pakai No. 1 seluas 981 m² terletak di Kelurahan Tegalmunjul, atas nama Pemerintah R.I. Cq. Mahkamah Agung R.I.;
 5. Sertifikat Hak Pakai No. 3 seluas 1.129 m² terletak di Kelurahan Munjuljaya, atas nama Pemerintah R.I. Cq. Mahkamah Agung R.I.
 6. Sertifikat Hak Pakai No. 21 seluas 1.645 m² terletak di Kelurahan Nageri Kidul, atas nama Pemerintah R.I. Cq. Mahkamah Agung R.I.

Sedangkan Nilai Gedung dan Bangunan pada satuan kerja Pengadilan Negeri Purwakarta per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.783.972.250,- (enam milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) terdiri dari:

a. Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rp4.688.644.412,-
b. Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Rp 39.078.000,-
c. Gedung Pos Jaga Permanen.....	Rp 39.485.766,-
d. Bangunan Rumah Dinas Gol.I Type B	Rp1.140.468.072,-
e. Bangunan Rumah Dinas Gol.I Type C	Rp 876.296.000,-
Jumlah	<u>Rp6.783.972.250,-</u>

3. Pengadaan

Dalam Tahun Anggaran 2019 ada pengadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung yaitu pengadaan 7 unit laptop dan 1 unit server.

4. Penghapusan

Dalam Tahun Anggaran 2019 belum mengusulkan penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Kantor.

Sarana dan prasarana fasilitas gedung yang mendukung keberlangsungan operasional Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B sampai dengan 31 Desember 2019 adalah senilai Rp33.286.693.205,- (tiga puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima rupiah) yang terdiri dari:

a. Peralatan dan mesin	Rp 2.852.479.333,-
b. Aset tetap yang tidak digunakan.....	Rp 68.759.622,-
c. Tanah.....	Rp23.535.282.000,-
d. Gedung dan bangunan	Rp 6.783.972.250,-
e. Jaringan	Rp 46.200.000,-
Jumlah	<u>Rp33.286.693.205,-</u>

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

- Implementasi e-Court di Pengadilan Negeri Purwakarta
 - Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B telah menerapkan E-Court sejak tanggal 20 Juli 2019.
 - Penerapan E-Court pada Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.
 - Jumlah perkara perdata gugatan yang mendaftar melalui e-Court sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebanyak 6 perkara, sedangkan perkara perdata permohonan sebanyak 60 perkara.
 - Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B telah menyediakan Meja Pojok e-Court dan Meja Inzage sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/ HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

tanggal 12 November 2019 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor W11.U7/6/KPN.PWK/OT.01/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penunjukan Admin e-Court Pada Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B.

- Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B juga menyediakan perangkat komputer dan printer serta penambahan koneksi internet dengan kapasitas 50Mbps (1:1) dalam upaya mendukung implementasi dan pelaksanaan e-Court.

- Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Purwakarta
 - Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B telah menggunakan aplikasi SIPP sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1012/SEK/HM.02.3/12/2017 tentang Implementasi SIPP versi 3.2.0 di lingkungan Badan Peradilan Umum pada tanggal 8 Desember 2017 dan versi SIPP telah diperbarui menjadi versi 3.2.0-5 pada tanggal 4 Oktober 2018 dan diperbarui kembali menjadi versi 3.3.0-1 pada tanggal 10 September 2019.
 - Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B mempunyai website SIPP Publik sebagai fasilitas dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik.
 - Untuk memudahkan para Pengunjung dalam melihat perkara yang sedang disidangkan telah disediakan Monitoring Jadwal Sidang yang ada di lobi dengan TV LED 52 inch, disediakan juga PC untuk Informasi Jadwal sidang yang disimpan di lobi Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B, dan sudah menyediakan perlengkapan Komputer/Laptop untuk para Hakim dan Pegawai serta PC di ruang Sidang Cakra dan ruang Sidang Garuda untuk mengakses SIPP.
 - Pengadilan Negeri Purwakarta juga telah menerapkan aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) pada tanggal 27 April 2018 sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 377/DJU/HM02.3/4/2018 tentang Rilis Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) tanggal 25 April 2018.
 - Saat ini perangkat pendukung yang terdapat di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B untuk menunjang SIPP adalah sebagai berikut.
 - a. Jaringan
 - 1) Modem : Huawei HG8245A
 - 2) Jumlah Hub/Switch : 18 Buah
 - 3) Jumlah Wireless Router : 9 Buah

- 4) Bandwidth Internet : 100 Mbps dan 50 Mbps (1:1)
- 5) ISP : Indihome dan Hypernet
- b. Server Aplikasi CTS/SIPP
 - 1) Type Model : Fujitsu Premergy RX 1330 MI
 - 2) Processor : Intel(R) Xeon (R) 3.06 GHz
 - 3) Memory : 4 GB
 - 4) Harddisk : 300x2 GB
 - 5) Sistem Operasi : Linux CentOS

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

- Akreditasi Penjaminan Mutu
 - Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B telah berhasil memperoleh Sertifikasi APM (Akreditasi Penjaminan Mutu) dengan predikat A Excellent dari Dirjen Badan Peradilan Umum pada tanggal 24 Juli 2018 dengan Nomor TAPM.029/QMR/SERTIFIKAT/7/2018, yang bukan saja sangat membanggakan, namun juga menjadi cambuk agar Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B dapat mempertahankan penghargaan dengan terus meningkatkan layanan publik dan kinerjanya di masa yang akan datang.
 - Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B telah dilakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada hari Kamis tanggal 20 bulan Juli tahun 2017 yang telah di Asesor oleh Tim Reformasi dari Mahkamah Agung RI dengan Capaian 82,38 (delapan puluh dua koma tiga puluh delapan) dengan nilai yang sangat baik, sebagai ketua Tim Assesor Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
 - Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B telah dilakukan penilaian kembali pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada hari Kamis tanggal 5 bulan Juli tahun 2018 yang telah di Asesor oleh Tim Reformasi dari Mahkamah Agung RI dengan Capaian 83,64 (delapan puluh tiga koma enam puluh empat) dengan nilai yang sangat baik, sebagai ketua Tim Assesor Drs. Erwin Widanarko, S.H., SAP., M.Pd.
 - Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B telah dilakukan Surveilans Audit Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) pada hari Kamis tanggal 3 bulan Oktober tahun 2019 oleh Tim Surveilans Audit Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Bandung sebagai ketua Tim Surveilans, Eddy Pangaribuan, S.H., M.H. dengan skor 715 (tujuh ratus lima belas) dengan nilai yang sangat baik A "Excellent".
 - Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Purwakarta menyediakan mesin kiosk Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Indeks Persepsi Korupsi untuk digunakan masyarakat dalam menilai pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B.

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
 - Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang peresmiannya dilakukan serentak oleh Direktur

Jenderal Badan Peradilan Umum pada tanggal 28 Maret 2018 di Pengadilan Negeri Bandung melalui *video teleconference*.

- Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B berdasarkan Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) meliputi bagian Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Hukum dan bagian Umum.
- Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B juga telah memberlakukan pelayanan permohonan Surat Keterangan secara elektronik melalui Eraterang berdasarkan Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP+) Dan Surat Keterangan Elektronik (Eraterang) Di Lingkungan Peradilan Umum.
- Penerapan pelaksanaan pelayanan permohonan surat keterangan melalui aplikasi Eraterang pada Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B sejak tanggal 1 Juli 2019 dan sampai saat ini permohonan surat keterangan yang diajukan secara online melalui aplikasi Eraterang sebanyak 22 surat permohonan.
- Berikut daftar Surat Masuk dan Surat Keluar pada Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B.

a. Jumlah Surat Masuk pada tahun 2019 sebanyak 1.754 surat terdiri dari:

1. Kepaniteraan:

- Kepaniteraan Pidana = 643 surat
- Kepaniteraan Perdata = 563 surat
- Kepaniteraan Hukum = 66 surat

2. Kesekretariatan:

- Perencanaan TI Pelaporan = 18 surat
- Umum = 242 surat
- Kepegawaian = 159 surat
- Keuangan = 63 surat

3. Panitera = - surat

4. Sekretaris = - surat

5. Ketua Pengadilan Negeri	=	-	surat
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri	=	-	surat
7. Humas	=	-	surat
8. DLL	=	-	surat

b. Jumlah surat keluar pada tahun 2019 sebanyak = 3.315 surat terdiri dari:

1. Kepaniteraan:

- Kepaniteraan Pidana	=	1.616	surat
- Kepaniteraan Perdata	=	870	surat
- Kepaniteraan Hukum	=	14	surat

2. Kesekretariatan:

- Perencanaan TI Pelaporan	=	8	surat
- Umum	=	96	surat
- Kepegawaian	=	581	surat
- Keuangan	=	130	surat

3. Panitera = - surat

4. Sekretaris = - surat

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri = - surat

6. Humas = - surat

- Inovasi Pelayanan Publik

- One Day Publish merupakan salah satu inovasi Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B yaitu setiap perkara yang telah diputus langsung diupload ke dalam direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sehingga publik dapat melihat putusan/perkara yang ada di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B dan bisa dilihat melalui website <http://www.pn-purwakarta.go.id>.
- Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B menghadirkan inovasi lain berupa aplikasi Monitoring Pengguna Internal Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri disingkat Mint SIPP PN yaitu sebuah aplikasi pendukung berbasis android dikhususkan untuk Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti untuk melihat dan memantau data perkaranya seperti riwayat perkara, jadwal sidang, status penetapan, biaya perkara, relaas, putusan, monitoring kelengkapan data untuk evaluasi aplikasi SIPP dan lain-lain.
- Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B juga menghadirkan inovasi Monitoring Pengguna Eksternal Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri disingkat MExt SIPP PN yaitu sebuah aplikasi pendukung untuk para pihak yang

sedang terlibat langsung dalam berperkara di pengadilan negeri, yakni Jaksa, Pengacara dan Para Pihak dalam perkara, untuk melihat dan memantau data perkaranya seperti riwayat perkara, status penetapan, list jadwal sidang dan data putusan. Aplikasi ini juga bisa digunakan oleh masyarakat umum untuk memantau jadwal sidang, tilang, mengecek biaya radius perkara, kalkulator biaya panjar dan lain sebagainya.

- Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B juga menyediakan layanan informasi berupa video yang ditampilkan di layar monitor di ruang tunggu pengunjung, adapun informasi yang ditampilkan mengenai e-Court, Eraterang dan Gugatan Sederhana sehingga pengunjung atau masyarakat pengguna pengadilan dapat melihat produk layanan yang ada di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B dan memahami alur penggunaan produk layanan tersebut.
- Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B juga membuat inovasi mengenai e-Court berupa video yang memuat informasi terbaru dan lebih dipahami oleh masyarakat.
- Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B juga menyediakan layanan informasi mengenai e-Court berupa e-book yang dapat diakses melalui website resmi Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B di alamat <http://www.pn-purwakarta.go.id>.

BAB VI PENGAWASAN

A. Internal

Berkenaan dengan adanya pergantian Hakim di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B tanggal 28 Oktober 2019 dan dalam rangka meningkatkan optimalisasi kinerja dan disiplin di berbagai bidang khususnya para pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B tentang Hakim Pengawas Bidang telah diperbarui/diubah berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B Nomor W11.U7/74.B/KPN.PWK/OT.00/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Penunjukan Koordinator Hakim Pengawas dan Hakim Pengawas Bidang yang terdiri dari:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Jarot Widiyatmono, S.H.	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas Bidang
2	Dian Sari Oktarina, S.H.	Hakim	Pengawas Bidang Kepaniteraan Muda Perdata
3	Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.	Hakim	Pengawas Bidang Kepaniteraan Muda Perdata, Mediasi dan Delegasi
4	Dr. Devi Mahendrayani H., S.H., M.H.	Hakim	Pengawas Bidang Kepaniteraan Muda Pidana, Wasmat, dan Hakim Peradilan Anak
5	Otto Edwin, S.H., M.H.	Hakim	Pengawas Bidang SIPP
6	Dewi Apriyanti, S.H., M.H.	Hakim	Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum
7	Hendhy Eka Chandra, S.H.	Hakim	Pengawas Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, dan Humas
8	Hj. Nurhuda, S.H., M.H.	Hakim	Pengawas Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
9	Hj. Lia Giftiany, S.H., M.Hum.	Hakim	Pengawas Sub Bagian Umum dan Keuangan
10	Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.	Hakim	Pengawas Bapor, Kebersihan, Keindahan dan Kerapihan (K3)

Selain dari pada itu guna menegakkan disiplin kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B telah pula dibentuk Tim Pengawasan Penegakan Disiplin Kerja berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B Nomor W11.U7/52.D/KPN.PWK/OT.00/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang terdiri dari:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Jarot Widiyatmono, S.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim merangkap Anggota

No	Nama	Jabatan	Keterangan
2	Hj. Nurhuda, S.H., M.H.	Hakim	Wakil Ketua Tim merangkap Anggota
3	Syarifuddin, S.H., M.Hum.	Panitera	Anggota I
4	Gegen Diosya Surendageni, S.H., M.H.	Sekretaris	Anggota II
5	Iis Cahya Suningsih	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota III dan Petugas Absensi

Dalam kenyataannya telah dilakukan pengawasan internal secara berkala baik oleh Tim Pengawas Internal Pengadilan Negeri Purwakarta maupun Hakim Tinggi Pengawas dari Pengadilan Tinggi Bandung dan bahkan Pengawasan yang dilakukan dari Mahkamah Agung RI yang turun langsung ke satuan kerja.

1. Secara Rutin telah dilaksanakan rapat bulanan yang membahas antara lain:
 - Evaluasi kinerja dan penyampaian hasil temuan dari masing-masing hakim pengawas bidang disertai rekomendasi dan tindak lanjut.
 - Mengumumkan bila ada peraturan, kebijakan baru serta informasi penting baik yang berasal dari Pimpinan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi ataupun yang berasal dari instansi lain yang perlu disampaikan kepada seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B.
 - Laporan minutası perkara termasuk pengecekan pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Direktori Putusan.
2. Secara berkala dilakukan rapat Khusus Hakim, Pejabat Struktural, Panitera Pengganti serta rapat khusus Juru Sita/Juru Sita Pengganti untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bagian dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsinya serta mencari solusi pemecahannya.
3. Secara berkala melakukan pemeriksaan/peninjauan langsung tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai SOP.
4. Pengawasan kedisiplinan, setiap hari dilakukan pengecekan rutin terhadap absensi Hakim dan Pegawai. Pimpinan akan memberikan teguran secara lisan kepada para Hakim dan Pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja. Hasil rekap absensi setiap bulan diawasi dan dinilai oleh pimpinan dalam hal ini oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B selaku Ketua tim Pengawasan.
5. Secara rutin dan berkala dilakukan pemeriksaan uang kas bendahara pengeluaran, serta pembukuan dan penatalaksanaan arsipnya.

B. Evaluasi

Pengawasan secara berjenjang merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan dalam setiap organisasi unit kerja agar berjalan secara efektif dan efisien. Pengawasan secara internal juga dilakukan terhadap pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B.

Dalam rangka Pengawasan tersebut terkandung pula unsur Pembinaan didalamnya oleh karena itu untuk lebih meningkatkan fungsi organisasi agar dapat berjalan dengan efektif dan untuk dapat memberikan kesempatan pada pejabat/pegawai memiliki karier yang lebih tinggi sesuai dengan penjenjangan yang ada maka telah pula diterbitkan surat-surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B yaitu:

- 1) Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B Nomor W11.U7/52.D/KPN.PWK/OT.00/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Tim Pengawasan Penegakan Disiplin Kerja Pada Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B.
- 2) Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B Nomor W11.U7/7.A/KPN.PWK/OT.00/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B.
- 3) Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B Nomor W11.U7/74.B/KPN.PWK/OT.00/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019, tentang Penunjukan Koordinator Hakim Pengawas dan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B.

Adapun pembinaan dan pengawasan terhadap personil Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja sehingga tercapai efisiensi kerja yang optimal dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap pelaksanaan tugas Pegawai Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap Pejabat Struktural dan Fungsional bidang teknis yustisial, administratif dan finansial.
3. Melaksanakan pembinaan terhadap Pegawai Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B baik melalui formal maupun non formal melalui pelaksanaan pembinaan secara berkala.

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terus meningkatkan pelayanan publik dengan tetap berpegang teguh pada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
2. Dalam meningkatkan pelayanan publik, Transparansi dan Akuntabilitas Publik Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B telah melakukan berbagai inovasi yang penting dan menjadi unggulan yaitu:
 - Program "One Day Service" yaitu pelayanan satu hari .
 - Program "One Day Minute" yaitu penyelesaian perkara yang putus langsung diminutasi pada hari itu juga.
 - Program "One Day Publish" yaitu putusan yang langsung diupload di SIPP dan direktori putusan Mahkamah Agung R.I.
3. Penyelesaian perkara pada tahun 2019 mencapai 87.19% hal ini menunjukkan bahwa semua perkara yang diterima pada tahun tersebut dapat diputus, walaupun diketahui bahwa ada pula perkara tahun 2018 yang diselesaikan pada tahun 2019.
4. Perbandingan antara perkara yang diterima dan diputus pada tahun 2019 adalah sebanyak 656 perkara diterima dan sebanyak 640 perkara diputus. Jadi masih ada perkara yang belum diputus sebanyak 94 perkara atau sebesar 0.14%.
5. Pengawasan terhadap pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B telah dilakukan dengan berbagai pengawasan diantaranya pengawasan administrasi peradilan maupun kesekretariatan, pengawasan tingkah laku dan perbuatan pejabat/pegawai, pengawasan insidentil pada permasalahan yang perlu segera mendapat penyelesaian dan lain sebagainya.
6. Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B yang ada dirasakan masih kurang dan perlu ditambah yaitu prasarana ruangan Barang Bukti, ruangan Ibu Menyusui/Laktasi, ruang Tunggu Anak, ruang Server, ruang Tunggu Pengunjung, Tempat Parkir Kendaraan, ruang Arsip dan ruang Perpustakaan.
7. DIPA Tahun Anggaran 2019 telah dapat direalisasikan secara baik dengan memperhatikan skala prioritas.

8. Pengelolaan arsip perkara sudah berjalan cukup baik namun demikian ruangan serta rak yang tersedia sudah tidak memadai lagi dan tidak dapat menampung seluruh berkas yang ada.
9. Penggunaan Teknologi Informasi sebagai salah satu bentuk transparansi serta sarana pemberian informasi kepada masyarakat terus ditingkatkan melalui website Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B: <http://www.pn-purwakarta.go.id>. dengan jalan selalu mengupdate berita dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B.

B. Rekomendasi

Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu alokasi anggaran di dalam DIPA Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B untuk Belanja Modal Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung (Penambahan Gedung Kantor) dapat diberikan kembali dan untuk peningkatan pelayanan itu pula Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B perlu ditunjang dengan penambahan tenaga kerja CPNS/PNS untuk tenaga staf yang sangat diperlukan di kepaniteraan dan di kesekretariatan serta tenaga ahli komputer untuk penambahan operator komputer, petugas khusus/admin (operator) yang menangani website SIPP/CTS dan staf administrasi.



PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS 1B

JL. K.K. SINGAWINATA NO 101 TELP: 0264-8222014

FAX: 0264-200830 PURWAKARTA 41111

Email : info@pn-purwakarta.go.id

Website : <http://www.pn-purwakarta.go.id>

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS 1B NOMOR W11.U7/1/KPN.PWK/OT.00/I/2020

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019 PADA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS 1B

KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS 1B

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 1730/SEK/OT.01.2/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *accountability* untuk terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisien, maka setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan harus dilaporkan sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan);
 - b. Bahwa guna kepentingan tersebut diatas, maka perlu dibentuk tim guna membantu Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B merumuskan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B Tahun 2019;
 - c. Bahwa Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang disusun tersebut meliputi seluruh kegiatan baik di bidang teknis dan kesekretariatan, target yang dicapai serta disesuaikan dengan DIPA tahun berjalan;
 - d. Bahwa nama-nama yang ditunjuk sebagai Tim tersebut dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 1730/SEK/OT.01.2/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019 PADA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS 1B

- Pertama** : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim untuk melaksanakan tugas menyusun dan atau merumuskan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B Tahun 2019;
- Kedua** : Tim yang dibentuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya;

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan para pejabat terkait dilingkungan Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PURWAKARTA

Pada tanggal : 2 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB



RUSTANTO, S.H., M.H.

NIP: 196707101991031006

Tembusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta.
2. Direktur Jendral Badan Peradilan Umum di Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung.
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B
Nomor : W11.U7/1/KPN.PWK/OT.00/I/2020
Tanggal : 2 Januari 2020

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	<u>RUSTANTO, S.H., M.H.</u> NIP: 196707101991031006	Ketua	Pembina	
2	<u>JAROT WIDIYATMONO, S.H.</u> NIP: 197211041998031003	Wakil Ketua	Ketua Tim merangkap Anggota	
3	<u>SYARIFUDDIN, S.H., M.Hum.</u> NIP. 196411261993031001	Panitera	Anggota	
4.	<u>GEGEN DIOSYA SURENDAGENI, S.H., M.H.</u> NIP: 196609261989031002	Sekretaris	Anggota	
5.	<u>IWAN GUNAWAN, S.H.</u> NIP: 197206111993031001	Plt. Panitera Muda Pidana	Anggota	
5.	<u>HENDRO CATUR SUCAHYO, S.H., M.H.</u> NIP: 196709031993031005	Panitera Muda Hukum	Anggota	
6.	<u>SUYAT, S.H.</u> NIP: 196011071986111001	Panitera Muda Perdata	Anggota	
7.	<u>ERFIN FITRIADI, S.Kom.</u> NIP: 197609272009041002	Kepala Sub.Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota	
8.	<u>IIS CAHYA SUNINGSIH</u> NIP:196804121994031002	Kepala Sub.Bag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota	
9.	<u>SASA ISMAIL</u> NIP:196812041993031005	Kepala Sub.Bag.Umum dan Keuangan	Anggota	

KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB



[Handwritten Signature]
RUSTANTO, S.H., M.H.
NIP: 196707101991031006